



Volume 8 Nomor 1 Januari 2014

Yulianti
Harryanto
Syamsuddin

Adi Lesmana
Nirwana
Muh. Natsir Kadir

Muhammad Fauzan Garantjang
Arifuddin
Muhammad Irdam Ferdiansah

Karlina Ghazalah Rahman
Ratna Ayu Damayanti
Mediaty

Fadilah Madjid
Harryanto
Asri Usman

Febri Amalia
Syarifuddin
Nirwana

ISSN 1979-1712

AKRUAL

Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer

Analisis Efektivitas Pertumbuhan Belanja Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Analisis Tiga Faktor yang Memengaruhi Independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Pengaruh Siklus Anggaran terhadap Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai)

Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar

Analisis Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maros)

Pengaruh Informasi Akuntansi dalam Pengambilan Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo (Studi pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo)

Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

**ANALISIS EFEKTIVITAS PERTUMBUHAN BELANJA DAERAH DAN
KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO**

***ANALYSIS THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL SPENDING GROWTH
AND FINANCIAL INDEPENDENCE AREAS TO
REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT***

Yulianti
Harryanto
Syamsuddin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efektivitas pertumbuhan belanja daerah dan kemandirian keuangan daerah terhadap produk domestik regional bruto. Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi anggaran pemerintah serta data produk domestik regional bruto. Berdasarkan populasi yang ada, maka dipilih sampel dengan menggunakan data panel yaitu laporan target dan realisasi APBD dan nilai PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama 2012-2014. Analisis data yang digunakan adalah Regresi Linear Berganda dengan bantuan program SPSS 19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pertumbuhan belanja daerah berpengaruh positif terhadap PDRB dan kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap PDRB.

Kata Kunci: efektivitas pertumbuhan belanja daerah, kemandirian keuangan, produk domestik regional bruto

This study aims to determine and analyze the effectiveness of regional spending growth and local financial independence to regional gross domestic product. The population in this study is the realization of the government budget report data as well as the regional gross domestic product data. Based on the existing population, the selected samples by using panel data that is the target statement and realization of the budget and the value of gross domestic product district / city in South Sulawesi province during 2012-2014. The data analysis used is multiple linear regression with SPSS 19. The results showed that the effectiveness of regional spending growth positive effect on the gross domestic product and local financial independence has no effect on the gross domestic product.

Keyword : the effectiveness of regional spending growth, local financial independence, regional gross domestic product

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang tersebut menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah

didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga dengan otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator petunjuk adanya pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil diharapkan berperan dalam meningkatkan kemampuan faktor-faktor produksi sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merefleksikan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dicapai oleh penduduk selama periode tertentu. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menggali potensi keuangan daerahnya secara mandiri.

Dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerintah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan pemerintah di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah guna meningkatkan pendapatan, yang akan berdampak pada kemampuan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah.

Pembangunan ekonomi pada dasarnya mengoptimalkan peranan-peranan sumber daya ekonomi yang ditujukan untuk menciptakan kenaikan pendapatan pada sektor-sektor ekonomi dan mengusahakan tercapainya pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah yang dilaksanakan membutuhkan anggaran belanja pada setiap periode. Seiring dengan peningkatan pembangunan daerah maka anggaran belanja yang diperlukan juga semakin meningkat. Anggaran belanja tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh daerah.

Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu pusat pengembangan dan pelayan pembangunan di wilayah kawasan timur Indonesia. Sebagai daerah otonom Provinsi Sulawesi Selatan memiliki sumber pendapatan yang potensial. Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat menjadi salah satu wilayah mandiri yang dapat mensejahterakan masyarakatnya serta dapat menjalankan pemerintahannya secara mandiri. Dalam konteks otonomi daerah saat ini, realisasi belanja operasi sering lebih besar dari pada belanja modal. Berikut perbandingan belanja operasi dan belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1.1
Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Kabupaten/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014

(dalam jutaan rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Belanja operasi	Belanja modal
1	Bantaeng	56.333	4.522
2	Barru	346.810	53.215
3	Bone	821.880	101.717
4	Bulukumba	101.062	2.062
5	Enrekang	338.277	6.442
6	Gowa	138.669	31.615
7	Jeneponto	343.636	27.668
8	Luwu	422.379	78.105
9	Luwu Utara	402.932	43.349
10	Maros	440.797	152.171

1.2. Rumusan Masalah

Ada beberapa rumusan masalah yang dapat ditarik sebagai kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulisan skripsi ini. Rumusan masalah diperlukan sebagai suatu cara untuk mengambil keputusan dari akhir penulisan skripsi ini.

Adapun pokok-pokok masalah yang dapat diambil untuk penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah terdapat pengaruh efektivitas pertumbuhan belanja daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
2. Apakah terdapat pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pertumbuhan belanja daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
2. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai efektivitas pertumbuhan belanja daerah dan kemandirian keuangan daerah yang dapat digunakan untuk mahasiswa yang menggeluti studi keilmuan bidang Akuntansi Sektor Publik.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini memberikan kontribusi dan manfaat bagi pemerintah dan dapat memberi stimulan bagi penelitian sejenis.

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah rancangan penelitian kuantitatif untuk mengetahui efektivitas pertumbuhan belanja daerah dan kemandirian keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Unit analisis dalam penelitian ini adalah lingkup kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Estimasi waktu penelitian dilakukan selama tiga bulan, mulai dari pengumpulan data yang ada hingga observasi langsung di lapangan.

3.2. Daerah dan Waktu Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian bertempat di lingkup kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian diperkirakan selama tiga bulan.

3.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi pendapatan dan belanja serta PDRB yang didapat dari Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan populasi yang ada, maka dipilih sampel dengan menggunakan data *time series* dan *cross section*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Kondisi Geografis

Letak geografis Provinsi Sulawesi Selatan adalah di antara $0^{\circ}12'$ - 8° LS dan $116^{\circ}48'$ - $122^{\circ}36'$ BT. Batas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, di bagian timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar dan bagian selatan berbatasan dengan Laut Flores.

Luas wilayah Sulawesi Selatan mencapai 45.764,53 km² yang terbagi menjadi 21 kabupaten dan 3 kota madya dan terdiri atas 304 kecamatan dan 2.953 desa/kelurahan.

4.1.2. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan salah satu sumber daya potensial dalam menunjang aktifitas pembangunan. Kedudukannya sebagai sumber daya manusia memegang peranan penting karena berfungsi menggerakkan faktor-faktor produksi dan jasa lainnya.

Tabel 4.1. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2014

Wilayah Sulawesi Selatan	2014				
	Luas		Penduduk		Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk(%)	
Kepulauan Selayar	903,50	1,97	128.744	1,53	142
Bulukumba	1.154,67	2,52	407.775	4,84	353
Bantaeng	395,83	0,86	182.283	2,16	461
Jeneponto	903,35	1,97	353.287	4,19	391
Takalar	566,51	1,24	283.762	3,37	501
Gowa	1.883,32	4,12	709.387	8,41	377
Sinjai	819,96	1,79	236.497	2,80	288
Maros	1.619,12	3,54	335.596	3,98	207
Pangkajene Kepulauan	1.112,29	2,43	320.293	3,80	288
Barru	1.174,71	2,57	170.316	2,02	145
Bone	4.559	9,96	738.515	8,76	162
Soppeng	1.359,44	2,97	225.709	2,68	166
Wajo	2.506,20	5,48	391.980	4,65	156
Sindereng rappang	1.883,25	4,12	286.610	3,40	152
Pinrang	1.961,17	4,29	364.087	4,32	186
Enrekang	1.786,01	3,90	198.194	2,35	111
Luwu	3.000,25	6,56	347.096	4,12	116
Tana Toraja	2.054,30	4,49	227.588	2,70	111
Luwu Utara	7.502,68	16,39	299.989	3,56	40
Luwu Timur	6.944,88	15,18	269.405	3,19	39
Toraja Utara	1.151,47	2,52	224.003	2,66	195
Makassar	175,77	0,38	1.429.242	16,95	8.131
Pare-pare	99,33	0,22	136.903	1,62	1.378
Palopo	247,52	0,54	164.903	1,96	666
Sulawesi Selatan	46.784,63	100	8.432.164	100	184

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan data BPS, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014 berjumlah 8.432.164 jiwa yang tersebar di 24 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar berada di Makassar dengan jumlah 1.429.242 jiwa. Kepadatan penduduk daerah perkotaan merupakan konsekuensi logis dari tingginya aktivitas perekonomian di sana. Oleh karena itu, meskipun luas wilayah

1,317). Maka Hipotesis nol (H_0) ditolak dan Hipotesis alternatif (H_a) diterima. Dengan kata lain variabel efektivitas pertumbuhan belanja daerah (X_1) berpengaruh positif terhadap PDRB daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian ini didukung dengan teori pengeluaran pemerintah yang menjelaskan bahwa pembelanjaan pemerintah terhadap berbagai kegiatan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara, maka jika dikaitkan dengan pembelanjaan pemerintah daerah yang tercermin dalam realisasi belanja APBD, semakin besar belanja pemerintah daerah maka semakin besar juga dampaknya terhadap perekonomian daerah.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Rahayu (2011), Agustina (2013) dan Larengkum (2014) yang menemukan bahwa belanja pemerintah berpengaruh positif terhadap produk domestik regional bruto. Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah yang dikelola daerah dengan baik. Maka daerah akan mampu membiayai pengeluaran pemerintah yang meliputi belanja operasional dan belanja modal. Dalam pembahasan sebelumnya alokasi belanja pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan lebih besar untuk belanja operasional. Oleh karena itu dalam rangka memacu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari peningkatan PDRB, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan harus lebih fokus dalam mengalokasikan anggaran untuk pos belanja modal. Dimana belanja modal merupakan jenis belanja untuk kegiatan pembangunan berbagai fasilitas publik yang bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2. Pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap PDRB

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap PDRB. Terlihat dari nilai t-hitung = 1,192 serta nilai signifikan 0,544 dan t-tabel = 1,317, maka t-hitung < t-tabel (1,192 < 1,317). berarti variabel kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian hipotesis tidak terbukti.

Hal tersebut diakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat rendah. Pendapatan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dominan bersumber dari dana transfer dibandingkan PAD. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi karena belum optimalnya penerimaan dari PAD. Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan lebih memaksimalkan sektor-sektor ekonomi potensial untuk meningkatkan PAD.

Kemandirian keuangan daerah yang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain untuk mendorong pemerintah daerah menjadi mandiri secara finansial atau harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD, karena kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat. Semakin tinggi kemandirian suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Efektivitas pertumbuhan belanja daerah memiliki pengaruh positif terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Semakin tinggi tingkat

pertumbuhan belanja daerah maka semakin tinggi pula PDRB. Hasil penelitian ini didukung dengan teori pengeluaran pemerintah yang menjelaskan bahwa pembelanjaan pemerintah terhadap berbagai kegiatan pembangunan akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara, maka jika dikaitkan dengan pembelanjaan pemerintah daerah yang tercermin dalam realisasi belanja APBD, semakin besar belanja pemerintah daerah maka semakin besar juga dampaknya terhadap perekonomian daerah.

2. Kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut diakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat rendah. Terlihat dari pendapatan daerah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dominan bersumber dari dana transfer dibandingkan PAD. Dengan kata lain ketergantungan daerah terhadap pusat masih tinggi karena belum optimalnya penerimaan dari PAD.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, peneliti mengajukan beberapa

1. Pemerintah Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan perlu lebih berusaha meningkatkan PAD melalui:

- a. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran.
- b. Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.
- c. Mengadakan pendekatan yang persuasive kepada wajib pajak agar memenuhi kewajibannya melalui kegiatan penyuluhan dan lain sebagainya.

2. Penelitian ini hanya menganalisis beberapa komponen dalam perkembangan APBD, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis seluruh komponen yang terdapat dalam APBD sehingga akan lebih lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Melasia. 2013. *Pengaruh Otonomi Daerah, Belanja Pemerintah dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Provinsi Bali Tahun 1993-2012*. Universitas Udayana. Bali.
- Azwar, Saifudin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Rafika Aditama.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. 2013. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011-2013*. Makassar.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Hanafi, Imam & Mugroho, Trilaksono. 2009. *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Pers.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Tentang Pedoman, Pengurusan, Pertanggungjawaban & Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah & Penyusunan Perhitungan APBD
- Larengkum, Dirgahayu. 2014. *Pengaruh APBD terhadap PDRB Kabupaten Kepulauan Talaud*. Universitas Samratulangi. Manado.
- Marizka, Addina. 2009. *Analisis Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan*. Universitas Sumatera Utara. Medan
- Mone, Indah Yuliani. 2013. *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Ekonomi Daerah di Kabupaten Pangkep*. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Najiah, Leni. 2013. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan & Tingkat Partisipasi Angkutan Kerja terhadap PDRB di Kota Depok Periode 2001-2010*.
- Nataluddin. 2001. *Potensi dana perimbangan pada pemerintahan daerali di Propinsi Jambi, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN
- Nordiawan, Deddi. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, Mafizatun. 2015. *Pengaruh Kemandirian Daerah, Investasi Pemerintah, Angkatan Kerja dan Pendapatan Perkapita terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Universitas Mercu Buana. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Bandung: Fokusmedia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Prasetya, Ferry. 2012. *Modul Ekonomi Publik*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang
- Pratini. 2014. *Analisis Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat*. Universitas Tanjungpura.

Rahayu, Sri Endang. 2011. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saputra, Budi. 2015. *Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi*. Universitas Jambi. Jambi.

Tarigan, Rabinson. 2012. *Ekonomi Regional*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Yulianti. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPPYKPN.